



Dampak Transformatif Bantuan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Liliriawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)

Yuliani*, Andi Patimbangi, Muhammad Fakhri Amir

Institut Agama Islam Negeri Bone

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v6i3.2473>

*Correspondence: Yuliani

Email: yulisep88@gmail.com

Received: 26-05-2025

Accepted: 26-06-2025

Published: 26-07-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyaluran bantuan sosial di Desa Liliriawang, khususnya melalui program keluarga harapan (PKH), serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan field research, mengumpulkan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan penerima bantuan dan aparat desa, serta dokumentasi. Subjek penelitian adalah masyarakat penerima bantuan sosial di Desa Liliriawang, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan memperhatikan perspektif ekonomi Islam yang mencakup aspek spiritual dan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan sosial berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar, mendukung pendidikan, dan meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga penerima. Namun, pelaksanaan dilapangan menghadapi beberapa tantangan, seperti keterlambatan distribusi, ketidakadilan dalam validasi data, dan kurangnya program pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Dalam perspektif ekonomi islam, bantuan sosial diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi melalui prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab.

Kata Kunci: Dampak Transformatif, Bantuan Sosial, Perspektif Ekonomi Islam

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak wilayah pedesaan di Indonesia, termasuk desa liliriawang yang terletak di kecamatan bengo, kabupaten bone. Desa ini, seperti banyak desa lainnya, memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang rentan, dengan mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian tradisional dan pekerjaan informal sebagai sumber mata pencaharian utama. Pendapatan yang tidak menentu, ditambah dengan keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang memadai, semakin memperparah kondisi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, intervensi melalui program bantuan sosial menjadi salah satu langkah penting yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa (Murdiyana & Mulyana, 2017).

Bantuan sosial merupakan bentuk intervensi pemerintah yang ditujukan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin atau rentan dengan tujuan

untuk mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Program ini dapat berupa bantuan tunai, pangan, kesehatan, pendidikan, dan berbagai bentuk bantuan lainnya. Di Indonesia, bantuan sosial sering menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial, terutama di daerah-daerah pedesaan yang masih tertinggal (Bangun et al, 2022). Dalam konteks desa liliawang, bantuan sosial yang diterima masyarakat mencakup berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga lembaga-lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam kegiatan sosial di desa.

Dampak transformatif dari bantuan sosial bukan hanya sekadar memberikan perbaikan ekonomi sementara bagi penerimanya, melainkan juga membuka peluang bagi masyarakat untuk membangun kemandirian, meningkatkan kapasitas diri, dan secara bertahap keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam ekonomi desa dengan bantuan sosial merujuk pada bagaimana program-program bantuan sosial dari pemerintah atau lembaga lainnya berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan mempengaruhi kegiatan ekonomi di desa tersebut. Bantuan sosial ini biasanya diberikan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar, dan meminimalkan kesenjangan sosial (Sofi, 2021).

Namun, penting untuk dicatat bahwa bantuan sosial tidak hanya diharapkan memberikan dampak sesaat atau bersifat sementara, seperti memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Lebih dari itu, bantuan sosial diharapkan dapat membawa dampak transformatif bagi masyarakat penerima manfaat, terutama dalam hal ekonomi. Dampak transformatif ini berarti bahwa bantuan sosial tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan dalam tatanan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Melalui program-program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pembangunan infrastruktur desa, masyarakat diharapkan dapat menjadi lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi, sehingga mampu keluar dari lingkaran kemiskinan yang selama ini mengungkung mereka (Sudarwati, 2009).

Dalam Perspektif Ekonomi Islam, bantuan sosial tidak hanya dipandang sebagai kewajiban pemerintah atau institusi sosial, tetapi juga sebagai bagian dari instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Islam mengajarkan pentingnya distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme zakat, infaq, dan sedekah. Instrumen-instrumen ini tidak hanya membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi juga berperan dalam menciptakan kesetaraan dan keseimbangan sosial (Chapra, 2008).

Ekonomi Islam memandang bahwa bantuan sosial harus memiliki dimensi pemberdayaan. Bantuan yang diberikan bukan hanya bersifat jangka pendek atau konsumtif, tetapi juga harus mencakup upaya peningkatan kapasitas penerima bantuan agar mereka mampu mandiri secara ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, dan penciptaan akses terhadap modal usaha. Prinsip dasar dalam Ekonomi Islam adalah bahwa bantuan sosial harus mampu

menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan, bukan hanya memberikan bantuan sesaat (Samud, 2018).

Selain itu, Ekonomi Islam menekankan konsep keadilan (*al-'adalah*) dan kesejahteraan umum (*Maslahah*). Setiap bentuk bantuan sosial yang diberikan harus didistribusikan secara adil dan tepat sasaran, dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (Purbaningrum & Adinugraha, 2024). Dengan pendekatan ini, bantuan sosial bukan hanya dilihat sebagai kewajiban pemerintah atau filantropi individu, tetapi sebagai mekanisme penting untuk mencapai stabilitas sosial dan ekonomi.

Desa lilirawang, yang terletak di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, merupakan salah satu desa di Sulawesi Selatan yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah terkait program bantuan sosial. Sejak diluncurkannya program bantuan sosial sekitar tahun 2014, desa ini telah mengalami perubahan signifikan, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Yulia et al, 2023). Bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat desa lilirawang mencakup berbagai jenis, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) yang diberikan secara berkala.

Salah satu fenomena menarik yang terjadi di Desa Lilirawang adalah jumlah penerima bantuan sosial yang relatif tinggi dibandingkan dengan desa-desa lain di sekitar Kecamatan Bengo. Dari data yang ada, tercatat bahwa sebanyak 1.116 jiwa di desa ini terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari berbagai jenis program. Jumlah yang besar ini menunjukkan bahwa desa lilirawang memiliki tingkat kemiskinan yang signifikan, sehingga banyak warganya memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Tingginya jumlah penerima bantuan sosial di desa lilirawang juga mencerminkan peran aktif pemerintah desa dalam memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan mendapatkan akses terhadap program-program tersebut. Fenomena ini juga mencerminkan adanya kesenjangan ekonomi di desa tersebut, di mana sebagian besar penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian dan pekerjaan informal, yang membuat mereka rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan keterbatasan akses terhadap sumber daya (Malik, 2018).

Sejak tahun 2014, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk mendata dan mendistribusikan bantuan secara merata kepada keluarga-keluarga yang layak. Hal ini melibatkan kerja sama antara pemerintah desa, aparat Kecamatan, dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang terlewat dari program-program bantuan tersebut. Namun, dengan banyaknya penerima, muncul pula tantangan dalam hal penyaluran yang tepat sasaran serta transparansi dalam pendataan penerima bantuan (Fardi & Pratama, 2023).

Meskipun demikian, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana proses penyaluran bantuan sosial dan bagaimana bantuan sosial ini berperan dalam mendorong transformasi ekonomi di desa Lilirawang. Dampak transformatif yang diharapkan tidak hanya sebatas pada peningkatan pendapatan atau kesejahteraan materi masyarakat, tetapi juga perubahan dalam struktur ekonomi desa, seperti peningkatan

produktivitas masyarakat, peningkatan keterampilan, serta terciptanya peluang usaha baru yang berkelanjutan. Melalui perubahan ini, masyarakat diharapkan dapat mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan sosial dan mampu membangun perekonomian desa secara mandiri.

Selain itu, dalam perspektif ekonomi islam, bantuan sosial memiliki nilai moral dan etika yang kuat. Dalam islam, bantuan sosial sering dikaitkan dengan konsep zakat, infaq, dan sedekah, yang merupakan instrumen distribusi kekayaan secara adil dan merata. Konsep ini menekankan pentingnya membantu kelompok masyarakat yang lemah dan kurang mampu sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan solidaritas umat (Dewi & Mawardi, 2025). Dalam konteks desa lilirawang, pelaksanaan bantuan sosial dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dari implementasi prinsip keadilan sosial yang diajarkan dalam islam. Penerapan konsep zakat, infaq, dan sedekah sebagai instrumen bantuan sosial tidak hanya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidup mereka secara mandiri dan berkelanjutan.

Meskipun penelitian Nurafni (2022) menunjukkan peran penting BST dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa pandemi, penelitian ini tidak secara mendalam membahas dampak jangka panjang atau transformasi struktural yang terjadi pada penerima bantuan. Selain itu, perspektif ekonomi Islam belum dijadikan sebagai kerangka analisis dalam memahami dampak bantuan sosial ini. Maka dari itu, penelitian tentang Dampak Transformatif Bantuan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Lilirawang memiliki kontribusi unik dalam melihat bagaimana bantuan sosial tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan sementara tetapi juga menciptakan dampak transformatif yang berkelanjutan dari sudut pandang ekonomi Islam.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dampak transformatif dari program bantuan sosial terhadap ekonomi desa, khususnya di desa Lilirawang. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana bantuan sosial mampu mendorong perubahan struktural dalam ekonomi desa dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut tentang dampak transformatif bantuan sosial (bansos), inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tambahan tentang "Dampak Transformatif Bantuan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam Desa Lilirawang Kecamatan Bengo Kab Bone".

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna, persepsi, dan pengalaman informan terkait bantuan sosial di Desa Lilirawang. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berupaya menangkap konteks sosial dan dinamika di lapangan secara menyeluruh, bukan mengukur data statistik. Penelitian menggunakan pendekatan Ekonomi, khususnya perspektif Ekonomi Islam yang tidak hanya berfokus pada capaian materi atau keuntungan, tetapi

juga nilai-nilai moral seperti keadilan, keberkahan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Lokasi penelitian bertempat di Desa Liliriawang, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang dipilih karena menerima bantuan sosial dalam jumlah relatif banyak dibandingkan desa-desa lain di wilayah tersebut. Subjek penelitian adalah penerima bantuan sosial di desa tersebut, sedangkan objek penelitiannya adalah dampak transformatif yang dihasilkan dari pemberian bantuan sosial. Data primer diperoleh langsung dari narasumber melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara data sekunder berupa dokumen-dokumen yang sudah ada seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah terkait.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung di lokasi penelitian untuk mengamati kondisi atau situasi di lapangan, serta wawancara mendalam dengan masyarakat penerima bantuan sosial dan aparat desa untuk mendapatkan keterangan terkait permasalahan penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang tidak didapatkan melalui dokumentasi semata.

Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data untuk merangkum dan mengambil pokok-pokok penting sesuai fokus penelitian. Kedua, penyajian data berupa kumpulan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ketiga, penarikan kesimpulan yang merupakan tahap akhir analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data.

Pendekatan ekonomi Islam dalam penelitian ini memperhatikan dimensi spiritual dan sosial, sehingga dampak bantuan sosial tidak hanya diukur dari segi finansial, tetapi juga sejauh mana bantuan tersebut mendorong pemberdayaan umat, mempererat solidaritas, dan menciptakan kesejahteraan bersama (*al-falah*) di Desa Liliriawang.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Liliriawang merupakan salah satu desa di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sejarah desa ini erat kaitannya dengan perjalanan panjang masyarakat agraris yang mengandalkan kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nama "Liliriawang" memiliki makna tersendiri dalam tradisi dan budaya masyarakat lokal, meskipun tidak ada dokumen resmi yang menjelaskan asal-usul nama ini secara spesifik. Dalam berbagai cerita turun-temurun, nama ini dihubungkan dengan panorama desa yang berada di dataran tinggi, memberikan kesan sejuk dan asri.

Awalnya, desa ini dihuni oleh kelompok masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada bercocok tanam. Letaknya yang strategis dengan ketinggian 235 meter di atas permukaan laut menjadikan desa ini memiliki tanah yang subur. Seiring berjalannya waktu, desa ini berkembang menjadi komunitas yang lebih besar dengan berbagai profesi masyarakat seperti petani, peternak, dan pengrajin.

Perkembangan desa mulai meningkat pesat pada awal abad ke-20 ketika infrastruktur dasar mulai dibangun. Pemerintah daerah melihat potensi Desa Liliriawang

sebagai salah satu sentra pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bone. Pengembangan irigasi, jalan desa, dan fasilitas umum lainnya menjadi tonggak awal transformasi desa ini.

Tradisi lokal, seperti gotong royong dan kegiatan adat, tetap menjadi ciri khas masyarakat desa. Desa ini juga menjadi salah satu contoh keberhasilan dalam menjaga nilai-nilai budaya di tengah perkembangan zaman. Saat ini, Desa Lilirawang dikenal sebagai desa yang menjunjung tinggi nilai religius dan adat istiadat, serta terus berkembang menjadi desa mandiri.

Masyarakat desa sebagian besar bekerja di sektor pertanian (1.358 orang), diikuti oleh pedagang/wiraswasta (332 orang), karyawan swasta (107 orang), dan buruh lepas (93 orang). Sebagian kecil lainnya bekerja sebagai PNS/TNI/Polri, tenaga kontrak, dan pensiunan.

2. Proses Penyaluran Bantuan Sosial Didesa Lilirawang

Bantuan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat (Setiawan et al., 2021). Di Desa Lilirawang, terdapat dua program utama yang menjadi andalan dalam membantu masyarakat yang kurang mampu, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) program ini bertujuan untuk memberikan dukungan langsung kepada keluarga miskin agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan (Samud, 2018).

Program Keluarga Harapan atau disingkat PKH adalah salah satu dari sekian program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat penerima yang dikategorikan sebagai rumah tangga miskin. Program ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan Kesehatan (Lestari, 2024).

Menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster terbawah berupa bantuan bersyarat yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terfokus pada pendidikan dan kesehatan. PKH ini dijalankan sebagai pelaksanaan dari UU No. 40 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Inpres no.3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan. Perpres No 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (Asmara et al., 2021).

Berdasarkan hasil wawancara Proses Penyaluran bantuan sosial di Desa Lilirawang dilakukan setiap tiga bulan sekali secara tunai. Proses ini melibatkan sejumlah tahapan, mulai dari verifikasi data penerima hingga distribusi langsung. Penerima bantuan diwajibkan membawa dokumen pendukung, seperti Kartu Keluarga (KK) dan kartu khusus PKH, sebagai bukti kelayakan mereka., Meskipun prosedur ini terlihat sederhana, pelaksanaannya di lapangan sering menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan distribusi bantuan.

Ketidakteraturan jadwal distribusi bantuan merupakan masalah utama yang muncul dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Desa Lilirawang. Meskipun pemerintah menetapkan jadwal penyaluran setiap tiga bulan, kenyataannya pelaksanaan di lapangan

sering kali tidak sesuai rencana. Hal ini menyebabkan penerima bantuan mengalami kebingungan dan kesulitan dalam merencanakan kebutuhan mereka sehari-hari. Untuk itu, diperlukan sistem komunikasi dan manajemen distribusi yang lebih baik agar program ini dapat berjalan tepat waktu.

Selain keterlambatan distribusi, validasi data penerima bantuan juga menjadi masalah yang signifikan. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat kasus di mana keluarga yang seharusnya tidak memenuhi kriteria tetap menerima bantuan. Permasalahan utama lainnya adalah validasi data penerima bantuan yang belum maksimal. Beberapa keluarga yang sudah mampu tetap menerima bantuan, sedangkan keluarga yang miskin justru tidak tercatat. Ini menunjukkan bahwa mekanisme pemutakhiran data belum berjalan secara optimal, dan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial serta ketidakadilan dalam masyarakat. Masalah validasi data ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pembaruan data secara berkala. Dalam banyak kasus, data penerima bantuan masih menggunakan data lama yang tidak mencerminkan kondisi terkini masyarakat. Misalnya, ada keluarga yang sudah mengalami perbaikan kondisi ekonomi tetapi tetap menerima bantuan, sementara keluarga lain yang jatuh miskin belum masuk dalam daftar penerima. Penelitian ini sejalan dengan Ashlikhatul Fuaddah literasi digital masyarakat sebagai respon persoalan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran (Fuaddah, n.d.).

Secara keseluruhan, meskipun bantuan sosial di Desa Liliriawang telah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, tantangan dalam distribusi, validasi data, serta keadilan perlu segera ditangani untuk meningkatkan efektivitas program ini.

3. Dampak Bantuan Sosial Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Liliriawang

Bantuan sosial yang diberikan melalui program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Liliriawang. Manfaat ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

A. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Salah satu dampak utama dari bantuan sosial adalah kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima. Dana bantuan tersebut digunakan untuk membeli bahan pangan seperti beras, telur, dan kebutuhan dapur lainnya. Selain itu, bantuan sosial juga digunakan untuk kebutuhan kesehatan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa bantuan sosial sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya (Ikhwan & Aslami, 2020). Pernyataan ini menunjukkan bahwa bantuan sosial berfungsi sebagai safety net (jaring pengaman sosial) yang mencegah keluarga miskin jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Dengan dana bantuan yang diterima secara rutin, keluarga penerima dapat menghindari kelaparan, malnutrisi, dan krisis ekonomi mikro dalam rumah tangga mereka.

Bantuan memungkinkan mereka membeli kebutuhan pangan dan obat-obatan yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini sejalan dengan temuan dalam literatur kebijakan sosial yang menyebutkan bahwa bantuan langsung tunai lebih cepat merespons kebutuhan mendesak dibanding program yang bersifat tidak langsung (Nurayu, 2022).

B. Perbaikan Pola Pengeluaran

Bantuan sosial juga berdampak pada perbaikan pola pengeluaran keluarga penerima. Sebelum menerima bantuan, sebagian besar pendapatan hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Namun, setelah adanya bantuan, keluarga dapat mengalokasikan pendapatan mereka untuk keperluan lain. Bantuan sosial memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga.

C. Dukungan Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian dalam program bantuan sosial (Anisha, 2024). Banyak penerima bantuan menggunakan dana yang diterima untuk membiayai keperluan pendidikan anak-anak mereka. Hal ini meliputi pembelian seragam sekolah, alat tulis, dan buku. Bantuan tersebut memberikan dampak positif dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Ibu Masna, seorang ibu rumah tangga, menyatakan bahwa bantuan yang diterima sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli bahan makanan pokok. Dan juga berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan anak-anak. Sumarni, salah satu penerima manfaat, mengungkapkan bahwa dana yang diterima digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah anaknya, seperti tas dan buku. Hal ini mendukung temuan Karimah (2023), yang menyatakan bahwa PKH memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat melalui peningkatan akses pendidikan.

Meskipun bantuan sosial memberikan banyak manfaat, dampaknya terhadap peningkatan ekonomi keluarga dalam jangka panjang sering kali dianggap terbatas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut (Haliim & Hakim, 2024):

a) Fokus pada Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Bantuan sosial lebih banyak digunakan untuk kebutuhan dasar seperti pangan dan pendidikan. Bantuan sosial yang diterima sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bantuan sosial cenderung bersifat konsumtif dan tidak diarahkan pada kegiatan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga secara berkelanjutan.

b) Kurangnya Program Pemberdayaan

Minimnya program pemberdayaan masyarakat menjadi kelemahan utama dari bantuan sosial di Desa Lilirawang. Bantuan ini belum berhasil meningkatkan keterampilan baru atau usaha tambahan. Padahal, program seperti pelatihan keterampilan atau pendampingan usaha dapat membantu keluarga penerima bantuan menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Ketiadaan program pemberdayaan ini membuat penerima bantuan tetap bergantung pada bantuan tanpa memiliki modal atau keterampilan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Untuk mencapai dampak jangka panjang yang lebih signifikan, diperlukan integrasi antara bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi. Program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan akses permodalan dapat membantu penerima manfaat meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi mereka. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat

pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Andari et al. (2022) yang menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan rentan sosial ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.

4. Bantuan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam memandang pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, pemerintah berkewajiban melindungi fakir miskin yang berada di daerah kekuasaannya dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan hidup mereka. Ekonomi Islam memiliki komitmen yang kuat untuk memerangi masalah kemiskinan yang membelenggu umat- Nya, Islam menilai kemiskinan sebagai bencana dan musibah yang harus ditanggulangi, diantara cara yang ditetapkan oleh Islam dalam menanggulangi kemiskinan adalah himbuan bekerja dan sederhana dalam pembelanjaan. Program pengentasan kemiskinan bukan hanya sekedar meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin saja, melainkan untuk menjaga stabilitas kehidupan rumah tangga miskin terhadap kebutuhan pokok dari amukan krisis ekonomi yang melanda masyarakat (Saraswati, 2018).

Bantuan sosial memiliki peran penting dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, bantuan sosial adalah implementasi dari nilai-nilai utama agama yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan pemberdayaan. Konsep-konsep seperti zakat, infak, dan sedekah menjadi dasar utama dalam pendekatan ini. Bantuan sosial tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, tetapi juga untuk memberikan mereka kesempatan yang lebih baik menuju kemandirian ekonomi (Samud, 2018).

Bantuan sosial yang efektif dalam perspektif ekonomi Islam harus memenuhi beberapa prinsip utama, yaitu keadilan dalam distribusi, efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan, serta pemberdayaan ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang produktif (Fatmawati, n.d.). Namun, implementasi bantuan sosial di lapangan, seperti yang terjadi di Desa Liliawang, masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperbaiki agar selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dalam implementasi bantuan sosial di Desa Liliawang, kurangnya transparansi dalam proses seleksi penerima bantuan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Purbaningrum & Adinugraha (2024) menyoroti bahwa ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial di Desa Pringsurat disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi. Kurangnya keterbukaan informasi mengenai kriteria penerima dan proses seleksi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan mengurangi efektivitas program bantuan sosial. Penelitian yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan informasi mengenai kriteria penerima dan proses seleksi dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial dan menurunkan efektivitas program. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dalam proses seleksi penerima bantuan sosial sangat penting untuk memastikan distribusi yang adil dan efektif, serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial pemerintah.

Dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Liliriawang, terdapat beberapa permasalahan yang mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, khususnya dalam aspek keadilan distribusi dalam distribusi menjadi persoalan ketika bantuan sosial tidak tepat sasaran; beberapa keluarga mampu justru menerima bantuan, sedangkan yang benar-benar membutuhkan tidak terdata.

Pada pelaksanaan Bantuan sosial di Desa Liliriawang menurut pandangan Ekonomi Islam, pemerintah telah menerapkan sikap tanggung jawab dan masih belum sepenuhnya menerapkan keadilan dan takaful. Walaupun masih banyak hal hal yang harus diperbaiki seperti sikap keadilan dan takaful itu sendiri. Kemudian, di sisi lain penerima bantuan sosial merasa masih belum siap apabila program keluarga harapan diberhentikan karena mereka masih sangat membutuhka. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketergantungan KPM kepada bantuan PKH yang diberikan oleh pemerintah. Cukup sejalan dengan hasil penelitian Rika Susanti dan Zuwardi (2023) di Jorong III Muara Sitabu menemukan bahwa meskipun PKH berperan dalam mengurangi kemiskinan, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, terutama dalam aspek keadilan. Distribusi bantuan yang tidak merata menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum diterapkan secara optimal (Susanti & Zuwardi, 2023).

Simpulan

Penyaluran bantuan sosial di Desa Liliriawang, khususnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), telah memberikan dampak positif dalam membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang perlu diperhatikan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidakteraturan jadwal penyaluran bantuan yang menyebabkan kebingungan bagi penerima, serta validasi data penerima yang belum optimal, di mana terdapat penerima bantuan yang tergolong mampu dan sebaliknya, keluarga miskin yang belum terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem distribusi dan pembaruan data masih perlu diperbaiki agar program bantuan sosial dapat berjalan lebih adil, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan utamanya dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Liliriawang memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Bantuan ini juga memberikan rasa aman bagi keluarga penerima serta memperbaiki pola pengeluaran rumah tangga, di mana sebagian keluarga mampu mengalokasikan penghasilan untuk keperluan lain.

Namun, manfaat bantuan sosial ini cenderung bersifat jangka pendek karena sebagian besar dana digunakan untuk konsumsi, bukan kegiatan produktif. Selain itu, tidak adanya program pemberdayaan masyarakat membuat penerima bantuan tetap bergantung pada bantuan tanpa adanya peningkatan kapasitas atau kemandirian ekonomi. Hal ini menunjukkan perlunya integrasi antara bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan bantuan sosial di Desa Lilirawang dalam perspektif Ekonomi Islam menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat miskin, khususnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam, yaitu keadilan distribusi, transparansi, dan konsep takaful (jaminan sosial). Ketimpangan dalam distribusi bantuan masih terjadi akibat data penerima yang tidak valid dan kurangnya transparansi dalam proses seleksi. Di sisi lain, pendamping program telah menunjukkan tanggung jawabnya secara cukup baik, namun penerima bantuan masih belum mandiri secara ekonomi dan masih bergantung pada bantuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi belum optimal dan jaminan sosial untuk masa depan belum terwujud.

Daftar Pustaka

- Andari, S., Febriyandi, F., Martino, M., Kuntjorowati, E., Purnama, A., Listyawati, L., Yusuf, H., & Murdiyanto, M. (2022). Upaya perempuan rentan sosial ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. *Sosio Informa*, 8(3).
- Anisha, D. (2024). Memahami dampak faktor sosial ekonomi terhadap pemerataan pendidikan dan keberhasilan siswa. *EDUCARE: Jurnal Pendidikan Dan Kesehatan*, 1(2), 57–62.
- Asmara, A. Y., Irwantoro, I., Rozikin, M., & Sayyidati, A. (2021). Evaluasi Implementasi Program Keluarga Harapan di Indonesia: Quick Evaluation Analysis. *Cakrawala*, 15(1), 24–42.
- Bangun, N. O., Suryani, S., & Raya, F. (2022). Implementation of The Bansos Program as An Effort to Improve Community Welfare During The Covid-19 Pandemic in Sentul Village, Tangerang District. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(2), 67–81.
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of Maqāsīd al-sharī‘ah. *Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank Jeddah, DOI*, 10.
- Dewi, K., & Mawardi, M. (2025). Konsep Keadilan dalam Distribusi Kekayaan: Perspektif Ekonomi Syariah Kontemporer. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1), 86–91.
- Fardi, M., & Pratama, I. N. (2023). Transparansi Pendataan Program Bantuan Sosial Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pegesangan Kota Mataram. *Journal of Social and Policy Issues*, 150–155.
- Fatmawati, S. (n.d.). Perspektif Ekonomi Islam terhadap Bantuan Dana Bagi Kesejahteraan Penyandang Cacat. *Hukum Islam*, 15(2), 186–194.
- Fuaddah, A. (n.d.). Literasi Digital Masyarakat sebagai Respon Persoalan Bantuan Sosial Yang Tidak Tepat Sasaran (Studi Kasus di Kelurahan Nanggewer, Cibinong, Bogor, Jawa Barat). *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 4(2), 74–82.
- Haliim, W., & Hakim, A. I. (2024). Ketergantungan Masyarakat Miskin Dan Dilema Kebijakan Sosial: Studi Pada Implementasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 97–112.

- Ikhwan, A., & Aslami, N. (2020). Implementasi data mining untuk manajemen bantuan sosial menggunakan algoritma K-Means. *Jurnal Teknologi Informasi*, 4(2).
- Karimah, S. (2023). Pengaruh Program Bantuan Sosial PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wringinagung Kabupaten Pekalongan. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 304–313.
- Lestari, A. Y. U. (2024). Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Malik, N. (2018). *Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia (Vol. 1)*. UMMPress.
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 73–96.
- Nurafni, N. (2022). Dampak Bantuan Sosial Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara Kota Palopo). Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Nurayu, A. (2022). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 pada Masyarakat Desa Terdampak Covid-19 di Desa Kresek. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 14–38.
- Purbaningrum, D., & Adinugraha, H. H. (2024). Transformasi kebijakan publik menyiasati ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di desa pringsurat untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 15(2), 31–44.
- Samud, S. (2018). Peranan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat melalui bantuan sosial perspektif ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(2), 215–228.
- Saraswati, A. (2018). Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Pandansurat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu). UIN Raden Intan Lampung.
- Setiawan, H. H., Nuryana, M., Susantyo, B., Purwanto, A. B., & Sulubere, M. B. (2021). Social entrepreneurship for beneficiaries of the Program Keluarga Harapan (PKH) toward sustainable development. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 739(1), 12053.
- Sofi, I. (2021). Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa dalam pemulihan ekonomi di desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247–262.
- Sudarwati, N. (2009). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan. Intimedia.
- Susanti, R., & Zuwardi, Z. (2023). Peran Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mengurangi Dan Memutus Rantai Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 2329–2342.

Yulia, A., Ilma, H., Badriyah, L., Karimatul, P., Dila, R. S., & Rahayu, Y. W. (2023). Analisis program beras untuk rumah tangga miskin (raskin). *Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children*, 1(1).